

STUDI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DI HUTAN BAMBU (Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang)

Disusun oleh :
Eddi Kurniawan¹
San Afri Awang²

INTISARI

Pengelolaan kawasan hutan dewasa ini membawa angin baru untuk lebih memperhatikan keberadaan masyarakat di sekitarnya. Era lama telah terbukti gagal, yaitu ketika pengelolaan hutan dilakukan dengan mengalienasi masyarakat sekitarnya. Tak dapat dipungkiri, menyerahkan pengelolaan suatu kawasan hutan kepada masyarakat sekitarnya yang telah lama mendiami merupakan satu bagian penyelesaian agar sisa-sisa hutan yang ada tetap terjaga kelestarian dan kemanfaatannya. Contoh nyata kesadaran masyarakat sehingga memunculkan perilaku positif dengan melestarikan dan mengelola hutan dengan benar dapat dilihat pada pengelolaan hutan bambu di Desa Sumberagung yang dilakukan oleh kelembagaan masyarakat lokal yaitu KPSA (Kelompok Pelestari Hutan Alam).

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dasar deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan semi terstruktur kepada responden terpilih. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan fenomenologik.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat lokal yang mengelola hutan bambu di Desa Sumberagung sudah berbentuk layaknya sebuah organisasi yang dibentuk oleh pihak luar/eksternal masyarakat yaitu Dinas Kehutanan dengan nama KPSA. Aktivitas yang dilakukan KPSA meliputi penataan batas kawasan hutan bambu, pembuatan aturan mengenai pengelolaan hutan bambu, upaya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya manfaat hutan bambu, pembicaraan dengan pemdes dan instansi terkait untuk mendapatkan payung hukum pengelolaan hutan bambu. KPSA terbentuk dari serangkaian proses interaksi bersifat kerjasama antara warga masyarakat (Propangkop) dengan Dinas kehutanan pada satu tujuan bersama. Upaya pengembangan kelembagaan yang dilakukan yaitu dengan memperluas keanggotaan KPSA meliputi seluruh wilayah Desa Sumberagung, melakukan pertemuan dengan aparat desa untuk menjalin kesepahaman dan kesepakatan mengenai tujuan dan model pengelolaan hutan bambu sebagai kawasan konservasi air (*water catchment area*) dengan menjadikan KPSA sebagai kelembagaan masyarakat desa.

Kata kunci : Fenomenologik, Kelembagaan, Kawasan

¹ Mahasiswa Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM, NIM 98/122256/KT/04191

² Dosen Pembimbing Skripsi, Staff Pengajar Fakultas Kehutanan UGM